



Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Di Era Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) (Studi Kasus Pada Tingkat Satuan Pendidikan Dasar di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan)

Baso Guliga¹, Zul Fachry², Zul Rachmat³, Zul Fadli⁴

^{1,2}Universitas Puangrimaggalatung Sengkang

³STMIK Amika Soppeng

⁴Universitas Pattimura Ambon

¹erka.ruangkreasi@gmail.com

²zulfachri25@gmail.com

³zulrachmatimran@gmail.com

⁴dhidottt@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di masa pandemi Covid-19 serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung kebijakan PTM di masa pandemi Covid-19 pada tingkat satuan pendidikan dasar di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan analisis dan bersifat deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi. Sumber data berasal dari tujuh orang informan utama yang fungsinya sejalan dengan kebijakn PTM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berdasarkan pada fokus komunikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo secara cepat mengkonfirmasi objek sasaran kebijakan PTM dengan tepat, sumberdaya pelaksana kebijakan memanfaatkan kewenangan dengan baik, serta sarana dan prasana dalam praktek pembelajaran dan pelayanan kesehatan juga terpenuhi secara menyeluruh dan merata. Faktor pendukung kebijakan didasarkan pada adanya regulasi yang mengatur tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Sedangkan faktor penghambat kebijakan adalah keterbatasan waktu dalam memberi pembelajaran dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler belum dapat dijalankan oleh satuan pendidikan.

Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan, Pembelajaran Tatap Muka.

1. Pendahuluan

Pada tanggal 30 Maret 2020, Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr selaku Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan pemberitahuan peringatan kepada masyarakat tentang kemungkinan mewabahnya Covid-19. Peraturan tersebut mengenai pemberitahuan perpanjangan waktu belajar dari rumah pada tingkat SLTA/MA, SLTP/MTsN, SD/MI sederajat dan SLB Negeri dan Swasta. Dalam pemberitahuan yang disampaikan, proses

pendidikan dan pembelajaran *face-to-face* atau tatap muka untuk sementara waktu dialihkan ke pembelajaran secara daring (online) hingga tanggal 17 April 2020. (Fadli et al., 2021)

Belajar dari rumah atau *Learning From Home (LFH)* merupakan metode pembelajaran secara online dimana metode ini seakan memberikan kesan yang lebih modern. Namun demikian, pada prakteknya Pembelajaran Dari Rumah / Pembelajara Jarak Jauh dinilai oleh masyarakat, guru, tidak terkecuali siswa/murid itu sendiri dirasa kurang maksimal. Hal ini timbul dengan berbagai macam keluhan mulai dari akses jaringan internet, perangkat/*smartphone* yang kurang mendukung, muatan materi yang diberikan guru kurang dapat dipahami, dan sebaliknya kualitas pemahaman daripada siswa itu sendiri tidak dapat dinilai secara objektif.

Organisasi atau individu harus mengubah perilakunya untuk dapat bertahan dalam kondisi pandemi ini. Untuk melanjutkan kegiatan ekonomi, skenario baru harus disiapkan terlebih dahulu untuk mengantisipasi bagaimana perekonomian akan beraksi. Pemerintah telah mengumumkan berbagai kebijakan dalam upaya menghentikan pandemi Covid-19. Diantaranya adalah *Social call, distancing of social, distancing of physical*, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Rachmat, 2021).

Memperhatikan regulasi dan fenomena serta dampak yang ditimbulkan atas permasalahan kesehatan secara global dan nasional terkait Covid-19 maka salah satu yang terkena imbas dan berdampak kemasyarakatan adalah masalah ekonomi dan dunia pendidikan terkhusus pada semua tingkat dan jenjang satuan pendidikan. Covid-19 ini telah memaksa struktur dalam kelembagaan serta pada dinamika hidup masyarakat mengalami perubahan termasuk sistem dan tata cara kelola pendidikan dipaksa untuk merubah kebijakan komprehensif dan terukur dengan lahirnya regulasi sebagai solusi proses pembelajaran siswa lewat Pembelajaran Jarak Jauh.

Wujud konsekuensi utama dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja, adalah pengelolaan administrasi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terdapat masalah dalam pengambilan keputusan kebijakan dan pelaksanaan yang terkait pada pemanfaatan prinsip-prinsip good governance dengan praktek pemerintahan yang baik seperti *'participation, rule of law, tranparancy, responsivines, consensus orientation*, kesetaraan, *effectifness accountability, staregic vision*, dalam memenuhi harapan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diduga menambah kebingungan sekaligus harapan masyarakat akan seperti apa sistem dan mekanisme PTM di era pandemi ini (Ismail et al., 2021).

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam pandangan peneliti ditemukan fenomena kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya terkomunikasi dengan baik, serta kesiapan sumber daya khususnya lingkup penyelenggara pendidikan belum terdisposisi dan tersrtuktur secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, dalam hal ini terkait dengan Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo beserta satuan pendidikan di bawah naungannya.

1.1 Identifikasi Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya adalah bagaimana proses kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di masa pandemi Covid-19 serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pada kebijakan PTM di masa pandemi Covid-19 pada tingkat satuan pendidikan dasar di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Kebijakan PTM di masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui, mengidentifikasi serta mendeskripsikan faktor apa saja yang pendukung dan penghambat di dalam implementasi kebijakan PTM tersebut.

1.3 Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

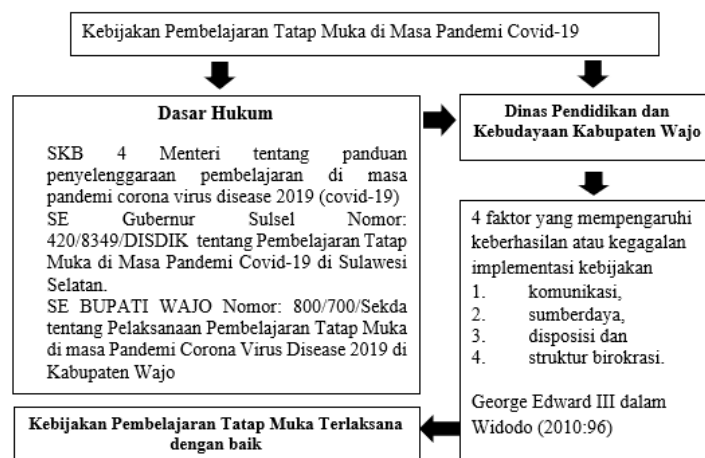
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terhadap perkembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai kebijakan pelayanan publik serta sebagai referensi penelitian berikutnya khususnya yang berkaitan dengan masalah kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di masa pandemi Covid-19.

b. Secara praktis

Agar penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah atau swasta yang membutuhkan baik sebagai pengetahuan ataupun sebagai dasar dalam mengambil sebuah kebijakan. Kemudian diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya tingkat Kota dan Kabupaten di seluruh wilayah Indonesia perihal acuan PTM. Serta penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang proses kebijakan PTM.

1.4 Kerangka Pikir

Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan peneliti, maka dibuatlah kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

- a. Mulyani dan Fadriati dengan judul penelitian Analisis Manajemen Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) Pada Era New Normal dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa sekolah perlu memperhatikan banyak hal dalam PTMT saat pandemic Covid-19 diantaranya manajemen sumber daya alam, manajemen kurikulum, serta manajemen pelaksanaan pembelajaran dengan perhatikan protokol kesehatan yang ketat.
- b. Fikri Annur dan Achmad Maulidi dengan judul penelitian Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19 dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan PTM di Pondok Pesantren Nuruhl Huda Pekandangan pada tahun 2020 sama seperti sebelum-sebelumnya dengan menggunakan sistem pembelajaran langsung (mubasyaroh) akan tetapi terdapat perubahan sistem yaitu perubahan dalam sistem pembuatan rencana pembelajaran (I'dad al-Tadris) dan perubahan durasi waktu per jam pelajaran dari 40 menit menjadi 25 menit dan penataan volume murid dalam kelas.
- c. Veny Iswantiningtyas, Dema Yulianto dan Hanggara Budi Utomo dengan judul penelitian Implementasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Daring Masa Kenormalan Baru Pada Anak Usia Dini di Kabupaten Kediri dengan hasil penelitian bahwa penerapan PTM *new normal* masa pandemi Covid-19 di Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Klandaran II Desa Klandaran Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk menunjang PTM tersebut, TK Dharma Wanita Klandaran juga menerapkan pembelajaran daring atau pembelajaran dari rumah dengan pelibatan anak didik yang sangat kooperatif.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang proses penelitiannya menggunakan data dari wawancara mendalam sesuai dengan tingkat kemampuan peneliti untuk mengungkap dan membahas fenomena atau berbagai hubungan yang berkaitan dengan objek atau fokus penelitian.

Informan penelitian terdiri atas 7 orang, diantaranya adalah 1) Kepala Disdikbud Kabupaten Wajo, 2) Koordinator Pengawas Disdikbud Kabupaten Wajo, 3) Satgas Covid-19 Puskesmas Tempe Kabupaten Wajo) Kepala Sekolah SD Negeri 1 Padduppa, 5) Kepala Sekolah SD IT Lingkar Cendekia, 6) Kepala SLTPN 1 Sengkang, 7) Kepala SLTPN 5 Sengkang.

Instrument penelitian ini merupakan peneliti sendiri sebagai instrument utama serta instrument pendukung berupa kegiatan wawancara. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi, wawancara serta telaah dokumen.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan dari keseluruhan hasil wawancara penulis dengan para informan dengan mengelola dimensi-dimensi yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa komunikasi yang dibangun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dalam rangka melakukan pemenuhan persiapan Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang selanjutnya disingkat (PTM) dilakukan dengan cara sosialisasi, informasi mengenai kebijakan terkait pelaksanaan PTM ditransmisikan ke segenap Obyek Sasaran Satuan Pendidikan melalui pembentukan Satuan Tugas PTM. Selanjutnya keberhasilan komunikasi ini dapat terlihat dengan baik manakala Obyek Sasaran Kebijakan PTM tersebut dipahami jelas apa yang harus dilakukan sesuai dengan pemenuhan tugas dan tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan dalam persiapan pelaksanaan Kebijakan PTM di masa pandemic Covid-19. Indikator penentu kesiapan PTM didasarkan pada Instrumen Daftar Periksa Kesiapan PTM Penilaian PTM terkait sarana dan prasarana sekolah yang di isi melalui laman kemendikbud/dapodik. Lebih lanjut dalam pelaksanaannya isi daripada aturan kebijakan tersebut secara konsisten dijadikan acuan dasar sebagaimana yang termuat di dalam Keputusan Bersama atau yang disingkat SKB 4 Menteri dengan berpedoman pada buku petunjuk teknis persiapan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi.

Terkait Sumberdaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo melalui Tim Satuan Tugas sendiri berjumlah sebanyak 172 orang dengan melibatkan beberapa unsur didalamnya diantaranya para pengawas TK, SD dan SMP, para penilik PAUD dan PNF, Pejabat eselon IV beserta staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta unsur dari Tim Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, masing-masing tim sebanyak 4 orang dengan total tim keseluruhan sebanyak 43 Tim dengan jumlah sasaran yang akan dikunjungi sebanyak 853 Sekolah dan Lembaga dengan rincian SMP : 74 sekolah SD: 398 Sekolah, TK: 184 Lembaga, KB: 179 Lembaga, TPA: 4 Lembaga dan PKBM: 14 Lembaga. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dalam penggunaan anggaran operasional kegiatannya ditunjang dari Dana Belanja Tidak terduga (ABPD melalui hasil reviu sedangkan untuk Satuan Pendidikan dasar menggunakan dana BOS untuk mendukung sarana prasarana dalam rangka pemenuhan persiapan PTM. Kewenangan telah diatur didalam SKB 4 Menteri yang kemudian disederhanakan melalui Juknis untuk memberikan penilaian, pengawasan kepada satuan pendidikan yang siap atau tidak siap dalam mengikuti PTM. Hal ini kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 532 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Persiapan pembelajaran tatap muka disekolah pada masa pandemic Corona Virus Disease 2019 Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Ajaran 2021/2022. Tim Satuan Tugas bekerja melakukan pengecekan langsung ke satuan pendidikan/lembaga dengan mengacu pada beberapa indikator-indikator yang terdapat dalam aplikasi Daftar Periksa di DAPODIK.

Terkait Disposisi berdasarkan Pengangkatan birokrasi ini dilakukan dengan empat kali rapat yang diadakan di ruang Mappadeceng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo terkait masalah tugas dan tanggungjawab dari komponen pelaksana yang akan turun dalam memberikan penilaian obyektif sesuai dengan instrument daftar kesiapan. Terkait masalah insentif maupun keuntungan didalam pelaksanaan Kebijakan PTM tidak hanya berbicara tentang finansial, dana operasional tim verifikator dibuatkan SK hanya untuk menunjang proses pengawasan PTM disekolah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun yang menarik didalam Satuan Pendidikan sepakat bahwa keuntungan yang didapatkan dengan kembali diadakannya PTM adalah pemenuhan tanggungjawab dapat berjalan maksimal, hal ini dikarenakan baik pendidik maupun tenaga kependidikan

sepakat bahwa penilaian kepada siswa tidak hanya berdasarkan pada tugas yang diberikan tetapi juga dengan pembentukan karakter mereka.

Terkait Struktur Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten didukung dengan adanya buku petunjuk teknis yang telah dibagikan kepada segenap Satuan Pendidikan, petunjuk teknis ini berisikan panduan tentang penyelenggaraan PTM baik tugas dan tanggungjawab serta aturan yang harus diterapkan. Jika melihat dari aspek komunikasi dalam dimensi konsistensi kebijakan, maka indikator struktur birokrasi dalam dimensi *Standard Operational Procedure (SOP)* telah terbukti berhasil dan berjalan dengan baik. Terkait Struktur Birokrasi, Hal ini dikarenakan adanya dukungan koordinasi yang terjadi didalam pengambilan keputusan yang apabila bersifat secara urgent terkait dengan pelaksanaan PTM maka Dinas Pendidikan memiliki hak untuk megambil tanggungjawab penuh untuk penutupan sekolah, kendati demikian Pihak Satuan Pendidikan juga memiliki kewenangan untuk mengatur warga satuan pendidikannya agar sekiranya pelaksanaan proses belajar mengajar tetap berlangsung dengan nyaman dan terkendali dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku.

3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Terkait dengan terlaksananya Kebijakan PTM adalah adanya regulasi yang mengatur Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 melalui Keputusan Bersama Empat Menteri, selanjutnya dukungan orangtua siswa yang menginginkan anaknya kembali bersekolah melalui surat pernyataan, kemudian untuk sarana dan prasarana penunjang PTM telah disesuaikan dengan standar kesehatan sebagai upayaantisipasi penyebaran covid-19. Lebih lanjut baik pendidik dan tenaga kependidikan serta warga satuan pendidikan telah melakukan vaksinasi rata-rata diatas 90% bahkan sudah ada yang mencapai 100%, ditunjang pula dengan zona wilayah resiko (PPKM) di Kabupaten Wajo masuk dalam kategori sangat rendah. Faktor yang menghambat pelaksanaan PTM sendiri lebih kepada Satuan Pendidikan belum dapat melakukan pembelajaran full secara maksimal. keterbatasan waktu dalam memberi pembelajaran dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler belum dapat dijalankan oleh Satuan Pendidikan. Selain itu didalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih harus selalu dilakukan pengawasan penuh agar kegiatan PTM dapat terus dilaksanakan tanpa menimbulkan resiko penularan Covid-19.

4. Kesimpulan

Berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Disdikbud Kabupaten Wajo berdasarkan fokus Komunikasi dapat dengan cepat terkonfirmasi pada objek sasaran kebijakan dengan baik, sumberdaya pelaksana kebijakan memanfaatkan kewenangan, sarana dan prasarana termasuk penganggaran dalam membantu masyarakat memperoleh hak dasar dengan praktek pembelajaran dan pelayanan kesehatan dengan baik. Melalui disposisi, pelibatan seluruh birokrat struktural dan fungsional serta stakeholder telah berjalan secara kondusif. Kebijakan ini tidak terlepas dari mekanisme dan prosedur didalam struktural birokrasi yang pada dasarnya menginginkan Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka untuk bersama-sama agar dilaksanakan secara maksimal. Faktor yang mendukung terlaksananya Kebijakan tersebut didasarkan pada adanya regulasi yang mengatur tentang Pedoman PTM di era Pandemi Covid-19 melalui Surat Edaran Empat Menteri, yang didukung oleh pendidik dan tenaga kependidikan serta warga satuan pendidikan yang telah melakukan vaksin sebagai syarat mutlak agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dapat dilaksanakan secara serentak. Adapun faktor yang menghambat

terlaksana dengan maksimalnya PTM hingga saat ini dikarenakan keterbatasan waktu dalam memberi pembelajaran dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler belum dapat dijalankan oleh Satuan Pendidikan. Pengawasan secara intens juga masih sangat diperlukan agar kiranya kebijakan PTM tersebut dapat terus berjalan.

Daftar Pustaka

- Fadli, Z., Rachmat, Z., & Wahyuddin. (2021). Teacher's Strategy in Increasing Student Learning Motivation At Nabigh Academic PAUD in Soppeng Regency During The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ekonomi BALANCE*, 17(2), 184–195.
- Ismail, I., Herlina, B., Pascasarjana, P., Studi, P., Publik, A., Puangrimaggalatung, U., Studi, P., Publik, A., & Puangrimaggalatung, U. (2021). *Penerapan Good Governance Dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*. 2(2), 560–571.
- Rachmat, Z. (2021). Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja dan Motivasi Karyawan Di PT. Fajar Makassar Televisi. *YUME : Journal of Management Volume 4 Issue 3 (2021) Pages 356 - 354*, 4(3), 340–345. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.532>
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono, Z. (2010). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press.
- Widodo, B. (2010). *Robotika—Teori dan Implementasinya*. Andi.